

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**TAHUN
2022**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu di setiap kegiatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Kritik dan saran sungguh kami harapkan sehingga akan dapat dijadikan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dari Satuan Polisi Pamong Praja ke depan agar lebih sempurna.

Harapan kami dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 ini dapat dijadikan dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 1 (satu) tahun ke depan.

Blitar, Juli 2021

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar



MUH. HADI MASKUN, SE

Pembina Tingkat I

NIP 196406171990031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2020
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
- Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar (Renstra Tahun 2016 – 2021)
- Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar (Renstra Tahun Tahun 2021 – 2026)
- Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal* maka dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja akan diarahkan untuk mewujudkan amanat dari peraturan tersebut tetapi tetap berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten / kota terdiri atas :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;

- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ada 3 peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut khususnya untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n + 1$;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

5. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2022.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berarti harus ada kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 juga berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementrian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahan) dan Renja Provinsi (Renja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementrian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahn dan Renja Satpol PP Provinsi Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2022.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022. Sedangkan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor...);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten

- / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1619);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor....);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
 21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;
 22. Peraturan Daerah Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6) ;
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 39).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu, dan sinergis antar sektor dan wilayah.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2022;
- b. Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan ;
- c. Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- d. Menyediakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan
- BAB II** Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III** Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- BAB IV** Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,

menguraikan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian mengenai garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Blitar tahun lalu (2020) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2021) dengan mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2020 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

6. Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat dalam **Tabel 2.1** sebagai berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	100 %	100 %	91,27 %	91,27 %	-	95,63 %	95,63
1.05.01.01.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	138 macam	235 macam	46 macam	40 macam	86,96 %	-	275 macam	199,27
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	18 cetakan	32 cetakan	6 cetakan	5 cetakan	83,33 %	-	37 cetakan	205,55
		Jumlah lembar penggandaan	56040 lembar	56041 lembar	18680 lembar	17710 lembar	94,81 %	-	73751 lembar	131,60
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	100 %	-	2 bahan bacaan	100

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1020 dos	920 dos	456 dos	151 dos	33,11 %	-	1071 dos	105
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	300 porsi	300 porsi	-	-	0 %	-	300 porsi	100
1.05.01.01.02	Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	111 rakor	193 rakor	30 rakor	28 rakor	93,33 %	-	221 rakor	199,1
1.05.01.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2 iuran	2 iuran	2 iuran	2 iuran	100 %	-	2 iuran	100
1.05.01.01.04	Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100 %	-	3 rekening	100
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	100 %	-	32 unit	100

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	33 komponen	59 komponen	11 komponen	11 komponen	100 %	-	70 komponen	212,12
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	72 macam	104 macam	24 macam	21 macam	87,50 %	-	125 macam	211,11
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	21 macam	18 macam	7 macam	14 macam	200 %	-	32 macam	152,38
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	30 macam	52 macam	12 macam	12 macam	100 %	-	64 macam	213,33
		Jumlah perlengkapan bangunan gedung kantor yang terpelihara	6 macam	33 macam	2 macam	2 macam	100 %	-	35 macam	583,33
		Jumlah peralatan bangunan gedung kantor yang terpelihara	30 macam	53 macam	10 macam	5 macam	50 %	-	58 macam	193,33

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	100 %	-	32 unit	100
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang tersedia	4 unit	-	-	-	0 %	-	-	0
		Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	6 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100 %	-	5 unit	83,33
1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100 %	99,22 %	100 %	100 %	100	-	99,22 %	99,22
1.05.01.02.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	12 event	16 event	2 event	3 event	150 %	-	19 event	158,33
		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	102 macam	113 macam	35 macam	23 macam	65,71 %	-	136 macam	133,33
		Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pegawai	162 orang	178 orang	73 orang	71 orang	97,26 %	-	249 orang	153,70

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.02.02	Kegiatan Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	6 publikasi	7 publikasi	2 publikasi	2 publikasi	100	-	9 publikasi	150
1.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	99,22%	100 %	100 %	100	-	99,61%	99,61
		Nilai SKM	Baik	Baik	Baik	Baik		-	Baik	
1.05.01.03.01	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	21 dokumen	33 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	-	40 dokumen	190,48
1.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase poskamling aktif	75,01 %	73,87 %	73,87	79,20	107,22 %	-	79,20	105,58
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	86,34 %	84,60 %	84,60	93,13	110,08 %	-	93,13	107,86

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.05.01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	450 orang	450 orang	100 orang	100 orang	100	-	550 orang	122,22
		Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum	63 laporan	63 laporan	36 laporan	45 laporan	125	-	108 laporan	171,43
		Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	2409 orang	2409 orang	877 orang	777 orang	88,60	-	3186 orang	132,25
1.05.01.05.02	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi gedung pemkot Blitar yang diamankan	29 lokasi	38 lokasi	38 lokasi	38 lokasi	156,96	-	38 lokasi	110,2
		Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	210 laporan	633 laporan	79 laporan	124 laporan	90	-	757 laporan	360,48
		Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum secara preventif dan preventif	144 laporan	156 laporan	48 laporan	48 laporan	100	-	204 laporan	141,67

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.05.03	Kegiatan Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi	72 laporan	66 laporan	24 laporan	17 laporan	70,83	-	83 laporan	115,28
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	177 orang	282 orang	56 orang	56 orang	100	-	338 orang	190,96
1.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase korban kebakaran yang tertangani	100 %	100 %	100 %	95 %	95	-	97,5 %	97,5
1.05.01.06.01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	600 orang	417 orang	200 orang	0 orang	0	-	417 orang	69,5
		Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar	15 macam	13 macam	3 macam	3 macam	100	-	16 macam	106,67

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah hydrant yang tersedia	24 unit	16 unit	8 unit	-	-	-	16 unit	66,67
		Jumlah hydrant yang terpelihara	45 unit	43 unit	21 unit	21 unit	100	-	54 unit	120
		Jumlah unit mobil damkar yang terpelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	-	10 unit	200,00
		Jumlah pakaian tahan api yang tersedia	4 unit	-	4 unit	0	0	-	-	-
1.05.01.07	PROGRAM PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH	Jumlah pelanggaran peraturan daerah	448 pelanggaran	451 pelanggaran	451 pelanggaran	448 pelanggaran	99,33	-	448	100
1.05.01.07.01	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum	1590 orang	1280 orang	530 orang	106 orang	20	-	1386 orang	87,17
		Jumlah peserta koordinasi penegakan Perda dan Perkada	240 orang	165 orang	80 orang	55 orang	68,75	-	220 orang	91,67

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.07.02	Kegiatan Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	72 laporan	42 laporan	24 laporan	24 laporan	100	-	66 laporan	91,67
		Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan Perda	162 orang	108 orang	54 orang	0 orang	0	-	108 orang	66,67
1.05.01.07.03	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggar Perda	72 laporan	48 laporan	145 laporan	209 laporan	144,14	-	257 laporan	356,94
		Jumlah laporan hasil penyelesaian dan penindakan pelanggaran Perda	72 laporan	48 laporan	145 laporan	209 laporan	144,14	-	257 laporan	356,94

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	91,27%	91,27%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	100 %	97,67%	97,67%
3.	Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	451 pelanggaran	448 pelanggaran	99,33%
4.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	46 macam	40 macam	86,96 %
		6 cetakan	5 cetakan	83,33 %
		18680 lembar	17710	94,81 %
		456 dos	151 dos	33,13 %
5.	Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	30 rakor	28 rakor	93,33 %
6.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	24 macam	21 macam	87,50 %
		10 macam	5 macam	50 %
7.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	35 macam	23 macam	65,71 %
		73 orang	71 orang	97,26 %
8.	Kegiatan Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	54 orang	0 orang	0 %

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
9.	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	530 orang	106 orang	20 %
10.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	877 orang	777 orang	88,60 %
11.	Kegiatan Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	24 laporan	17 laporan	70,83 %

Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga akibatnya target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
2. Jumlah peserta yang hadir sosialisasi tidak sesuai dengan jumlah undangan.
3. Belum adanya peraturan walikota tentang pelaksanaan Perda No 1 tahun 2017.
4. Adanya pergeseran anggaran untuk kegiatan pencegahan penyebaran covid 19, tetapi belum diikuti dengan perubahan target kinerja.

Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100 %
2.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	100 %

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	2 iuran	2 iuran	100 %
4.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	3 rekening	3 rekening	100 %
		32 unit	32 unit	100 %
		11 komponen	11 komponen	100 %
		12 macam	12 macam	100 %
		11 macam	11 macam	100 %
		2 macam	2 macam	100 %
		32 unit	32 unit	100 %
5.	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100 %
6.	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
7.	Kegiatan Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	2 publikasi	2 publikasi	100 %
8.	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100 %
9.	Kegiatan Penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan Daerah	24 laporan	24 laporan	100 %
10.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	100 orang	100 orang	100 %

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
11.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	38 lokasi	38 lokasi	100 %
		48 laporan	48 laporan	100 %
12.	Kegiatan Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	56 orang	56 orang	100 %
13.	Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	3 macam	3 macam	100 %
		24 unit	24 unit	100 %

Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
2. Target yang telah direncanakan sudah tepat.

Adapun Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	100%	103,24 %	103,24 %
2.	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	73,87 %	79,20 %	107,22 %
		84,60%	93,13%	110,08 %
3.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	7 macam	14 macam	200 %
4.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	2 event	3 event	150 %

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
5.	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	145 laporan	209 laporan	144,14 %
6.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	36 laporan	45 laporan	125 %
7.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	79 laporan	124 laporan	156,96 %

Faktor – faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

1. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Dalam perencanaan dan penganggaran harus benar – benar diperhitungkan dengan seksama.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengemban pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator yang harus diukur adalah sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan dari akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Setiap tahun
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap tahun

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat ditunjukkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2020
Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator dan Nilai SPM	Target Nasional	Target Daerah			Realisasi Target Daerah		Proyeksi
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %	100 %

Dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut di atas, sesuai Permendagri Nomor 100 tahun 2020 ada 2 indikator yang harus dicapai yaitu sebagai berikut.

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung **Misi ke 1** “ Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan “, **Tujuan ke 1** “ Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis “, **Sasaran ke 2** “ Meningkatkan ketertiban umum” dan **Misi ke 3** “ Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital”, **Tujuan ke 1** “ Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat “, **Sasaran ke 2** “ Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana “. Apabila target kinerja tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar;
- ❖ Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar ;

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Keterbatasan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja ;
- ❖ Keterbatasan jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi ;
- ❖ Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan ;
- ❖ Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya .

b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan ;
- ❖ Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna ;
- ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal ;
- ❖ Dinamika masyarakat yang semakin kompleks ;
- ❖ Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal ;
- ❖ Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda ;
- ❖ Koordinasi antara Perangkat Daerah terkait belum berjalan secara optimal .

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;

- ❖ Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum ;
- ❖ Keberadaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya ;
- ❖ Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis yang dimaksud antara lain :

1. Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
2. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna
3. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan
4. Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD belum optimal
5. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
6. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota.*

7. Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran yang merupakan amanat Permendagri No 114 tahun 2018.

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Dalam penegakan perda dan perkara direncanakan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan lebih taat jadwal .
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku.
3. Menambah volume kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban umum agar bisa menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar.
4. Mengoptimalkan koordinasi antara perangkat daerah .
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang melibatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
6. Mengoptimalkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Pemulihan ekonomi melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, serta ekonomi kreatif berbasis digital;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
4. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berorientasi masyarakat, dan berbasis teknologi informasi;
5. Peningkatan nilai-nilai religius, nasionalis, setara gender, berbudaya, kondusif, dan demokratis; dan
6. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, dan ketahanan bencana.

Dengan Fokus :

1. Percepatan realisasi kinerja daerah guna terwujudnya visi pembangunan Kota Blitar ; dan
2. Pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak bencana nasional COVID-19.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam **Tabel 2.3** sebagai berikut .

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	7.502.241.828,-	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	7.502.241.828,-	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	13.546.500,-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	13.546.500,-	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	3.041.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	3.041.000,-	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	15 dokumen	10.505.500,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	15 dokumen	10.505.500,-	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.638.919.438,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.638.919.438,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	1 OPD	5.638.006.138,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	1 OPD		
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun	5 laporan	913.300,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun	5 laporan		
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	270.926.026,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	270.926.026,-	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	7 macam	70.908.376,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	7 macam	70.908.376,-	
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kota Blitar	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	200.017.650,-	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kota Blitar	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	200.017.650,-	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	65 orang				Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	65 orang		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	65 orang				Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	65 orang		
			Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai	300 orang				Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai	300 orang		
			Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	1 publikasi				Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	1 publikasi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	199.239.600,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	199.239.600,-	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 komponen	5.144.600,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 komponen	5.144.600,-	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	1 macam	585.900,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	1 macam	585.900,-	
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	0 macam				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	0 macam		
4.3	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	21 macam	3.289.500,-	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	21 macam	3.289.500,-	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	215 dos	16.921.100,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	215 dos	16.921.100,-	
			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 macam				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 macam		
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah barang cetakan yang tersedia	5 cetakan	7.028.400,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah barang cetakan yang tersedia	5 cetakan	7.028.400,-	
			Jumlah lembar penggandaan	10053 lembar				Jumlah lembar penggandaan	10053 lembar		
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Blitar	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	4.080.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Blitar	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	4.080.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	46 rakor	162.190.100,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	46 rakor	162.190.100,-	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	100 %	69.901.524,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	100 %	69.901.524,-	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	68.399.124,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	68.399.124,-	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2 iuran	1.502.400,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2 iuran	1.502.400,-	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercukupi	100 %	309.708.740,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercukupi	100 %	309.708.740,-	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	30 unit	265.031.040,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	30 unit	265.031.040,-	
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	38 unit				Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	38 unit		
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 macam	9.070.300,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 macam	9.070.300,-	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit	24.480.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit	24.480.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 macam	11.127.400,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 macam	11.127.400,-	
II.	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	86,30 %	10.703.204.950,-	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	86,30 %	10.703.204.950,-	
			Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	92,60 %				Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	92,60 %		
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan	1946 kasus	10.549.762.450,-	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan	1946 kasus	10.549.762.450,-	
1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas	48 laporan	10.423.231.750,-	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas	48 laporan	10.423.231.750,-	
			Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas	48 laporan				Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas	48 laporan		
			Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP	68 laporan				Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP	68 laporan		
			Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	60 laporan				Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	60 laporan		
			Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	39 lokasi				Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	39 lokasi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Blitar	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas	24 laporan	23.797.000,-	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Blitar	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas	24 laporan	23.797.000,-	
1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	24 laporan	17.748.000,-	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	24 laporan	17.748.000,-	
1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	93 orang	23.681.500,-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	93 orang	23.681.500,-	
			Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	50 orang				Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	50 orang		
1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Blitar	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	57 orang	61.304.200,-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Blitar	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	57 orang	61.304.200,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	54 orang				Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	54 orang		
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	153.442.500,-	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	153.442.500,-	
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	378 orang	30.851.800,-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	378 orang	30.851.800,-	
2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	12 laporan	10.895.100,-	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	12 laporan	10.895.100,-	
			Jumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada	35 orang				Jumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada	35 orang		
2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggaran perda / perkada	25 laporan	111.695.000,-	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggaran perda / perkada	25 laporan	111.695.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda / perkara	9 laporan				Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda / perkara	9 laporan		
			Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda	10 laporan				Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda	10 laporan		
			Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara	75 orang				Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara	75 orang		
III.	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Blitar	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	528.905.400,-	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Blitar	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	528.905.400,-	
1.	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</i>	<i>100 %</i>	<i>56.378.400,-</i>	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Kota Blitar</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</i>	<i>100 %</i>	<i>56.378.400,-</i>	
1.1	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran	12 laporan	22.687.000,-	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran	12 laporan	22.687.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah laporan pemadaman kebakaran	12 laporan	7.445.000,-	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah laporan pemadaman kebakaran	12 laporan	7.445.000,-	
1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	12 laporan	26.246.400,-	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	12 laporan	26.246.400,-	
			Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia	12 macam				Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia	12 macam		
2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100 %	444.566.600,-	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100 %	444.566.600,-	
2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusun	1 dokumen	430.616.600,-	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusun	1 dokumen	430.616.600,-	
			Jumlah hydrant yang tersedia	4 unit				Jumlah hydrant yang tersedia	4 unit		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi	1 macam				Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi	1 macam		
2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	5 macam	13.950.000,-	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	5 macam	13.950.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang tersusun tepat waktu	100 %	27.960.400,-	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang tersusun tepat waktu	100 %	27.960.400,-	
3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 orang	27.960.400,-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 orang	27.960.400,-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan pembangunan pada tahun 2022. Sebagian usulan tersebut sudah diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022, tetapi besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan OPD. Usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam **Tabel 2.4** berikut .

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	RW.04, Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	20 orang	Diakomodir tetapi untuk kuantitas sesuai dengan jumlah anggaran yang ada
2.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	sepanjang jl tgp dan jl veteran, Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda / perkara	12 laporan	
3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jl. Bengawan Solo RW 3, Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	20 orang	
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kelurahan Turi, Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	15 orang	
5.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	RW 02 dan RW 10, Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	20 orang	

No	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jl, Anggrek RT 01 / RW IV, Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	20 orang	
7.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jl. Galunggung RW II, Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah hydrant yang tersedia	1 unit	
8.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Sekitar Poskamling, Kantor Kelurahan dan Agro Belimbing Karangsari (detail lokasi ada di foto), Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah hydrant yang tersedia	14 unit	
9.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Karangsari, Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	50 orang	
10.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	RW 1 s/d RW 11, Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	33 orang	
11.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	warga RW .02, Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah hydrant yang tersedia	1 unit	
12.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Sananwetan Jl.A.Yani No.129 Kota Blitar, Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	60 orang	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - ❖ Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - ❖ Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - ❖ Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - ❖ Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - ❖ Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - ❖ Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - ❖ Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
 - ❖ Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - ❖ Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
 - ❖ Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - ❖ Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - ❖ Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - ❖ Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - ❖ Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - ❖ Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - ❖ Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - ❖ Pembangunan Wilayah Papua.

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
 - ❖ Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - ❖ Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - ❖ Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - ❖ Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - ❖ Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - ❖ Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
 - ❖ Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - ❖ Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - ❖ Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - ❖ Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - ❖ Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - ❖ Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
 - ❖ Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - ❖ Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - ❖ Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - ❖ Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - ❖ Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
 - ❖ Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - ❖ Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan

- ❖ Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
- ❖ Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara secara Optimal;
 - ❖ Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
 - ❖ Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
 - ❖ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - ❖ Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2021 sebagaimana dalam **Tabel 3.1** di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
(Renstra Tahun 2016 – 2021)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Target	
			2020		2021	2022
1.	Tujuan : Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	1,53 %	1,97 %	0,67 %	-
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	91,95 %	92,41 %	92,61%	-
1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3,78 %	4,21 %	1,74 %	-
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota	0,82	0,85	1,00%	-
1.3	Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	80 %	85 %	85 %	-

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
(Renstra Tahun 2021 – 2026)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Target	
			2020		2021	2022
1.	Tujuan : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	-	1,97 %	0,67 %	2,01%
1.1	Sasaran : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	-	92,41 %	1,74 %	4,39%
2.	Tujuan : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	-	0,56
2.1	Sasaran : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	-	85 %	85 %	90%

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Blitar sehingga program dan kegiatan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota Blitar.

2. Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara – negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memnuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh

sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Blitar. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 diarahkan pada upaya pemantapan daya saing ekonomi daerah yang didukung manajemen SDM dan profesionalisme aparatur.

3. Pencapaian SPM

Perumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diarahkan untuk mencapai standard pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota*. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota meliputi :

- a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;

- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan / sumber daya manusia;
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2022 adalah 3 program, 11 kegiatan, dan 32 sub kegiatan. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana **Tabel 4.1** berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						-		
1.05.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	Kota Blitar	100 %	6.502.241.828,-	APBD	-	100 %	6.244.494.832,-
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	13.546.500,-	APBD	-	100 %	3.545.600,-
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Kota Blitar	10 dokumen	3.041.000,-	APBD	-	10 dokumen	3.041.000,-
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	Kota Blitar	15 dokumen	10.505.500,-	APBD	-	15 dokumen	505.600,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	5.638.919.438,-	APBD	-	100 %	5.511.962.566,-
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Blitar	1 OPD	5.638.006.138,-	APBD	-	1 OPD	5.469.949.266,-
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun	Kota Blitar	5 laporan	913.300,-	APBD	-	5 laporan	42.013.300,-
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar	100 %	270.926.026,-	APBD	-	100 %	138.530.206,-
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	Kota Blitar	7 macam	70.908.376,-	APBD	-	7 macam	86.406.126,-
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Kota Blitar	4 event	200.017.650,-	APBD	-	4 event	52.124.050,-
		Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian		65 orang				65 orang	
		Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian		65 orang				65 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai		300 orang				300 orang	
		Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah		1 publikasi				1 publikasi	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	199.239.600,-	APBD	-	100 %	202.186.452,-
1.05.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Blitar	5 komponen	5.144.600,-	APBD	-	5 komponen	5.514.196,-
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Kota Blitar	1 macam	585.900,-	APBD	-	1 macam	1.177.659,-
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi		0 macam				0 macam	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Kota Blitar	21 macam	3.289.500,-	APBD	-	21 macam	3.322.395,-
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	Kota Blitar	215 dos	16.921.100,-	APBD	-	215 dos	17.189.695,-
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		43 macam				43 macam	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Kota Blitar	5 cetakan	7.028.400,-	APBD	-	5 cetakan	7.050.507,-
		Jumlah lembar penggandaan		10053 lembar				10053 lembar	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kota Blitar	2 bahan bacaan	4.080.000,-	APBD	-	2 bahan bacaan	4.120.000,-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Kota Blitar	46 rakor	162.190.100,-	APBD	-	46 rakor	163.812.000,-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kota Blitar	100 %	69.901.524,-	APBD	-	100 %	70.600.539,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Kota Blitar	3 rekening	68.399.124,-	APBD	-	3 rekening	69.083.115,-
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	Kota Blitar	2 iuran	1.502.400,-	APBD	-	2 iuran	1.517.424,-
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercukupi	Kota Blitar	100 %	309.708.740,-	APBD	-	100 %	317.668.469,-
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Kota Blitar	30 unit	265.031.040,-	APBD	-	30 unit	268.802.450,-
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya		38 unit				38 unit	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kota Blitar	6 macam	9.070.300,-	APBD	-	6 macam	9.251.900,-
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Kota Blitar	2 unit	24.480.000,-	APBD	-	2 unit	26.014.267,-
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kota Blitar	2 macam	11.127.400,-	APBD	-	2 macam	13.599.852,-
1.05.02	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Kota Blitar	86,30 %	10.703.204.950,-	APBD	-	86,30 %	10.465.005.380,-
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan		92,60 %				92,60 %	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan	Kota Blitar	1946 kasus	10.549.762.450,-	APBD	-	1946 kasus	10.211.699.898,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas	Kota Blitar	48 laporan	10.423.231.750,-	APBD	-	48 laporan	10.027.427.409,-
		Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas		48 laporan				48 laporan	
		Jumlah laporan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah dan tamu VVIP		68 laporan				68 laporan	
		Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara		60 laporan				60 laporan	
		Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan		39 lokasi				39 lokasi	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas	Kota Blitar	24 laporan	23.797.000,-	APBD	-	24 laporan	23.462.300,-
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	Kota Blitar	24 laporan	17.748.000,-	APBD	-	24 laporan	40.177.800,-
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	Kota Blitar	93 orang	23.681.500,-	APBD	-	93 orang	53.821.183,-
		Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat		50 orang				50 orang	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Kota Blitar	57 orang 54 orang	61.304.200,-	APBD	-	57 orang 54 orang	66.811.206,-
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	Kota Blitar	100 %	153.442.500,-	APBD	-	100 %	245.569.276,-
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	Kota Blitar	378 orang	30.851.800,-	APBD	-	378 orang	86.779.200,-
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS Jumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada	Kota Blitar	12 laporan 35 orang	10.895.100,-	APBD	-	12 laporan 35 orang	28.007.600,-
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggaran perda / perkada Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda / perkada	Kota Blitar	25 laporan 9 laporan	111.695.000,-	APBD	-	25 laporan 9 laporan	130.782.476,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda		10 laporan				10 laporan	
		Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara		75 orang				75 orang	
1.05.04	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Kota Blitar	100 %	528.905.400,-	APBD	-	100 %	584.493.852,-
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Kota Blitar	100 %	56.378.400,-	APBD	-	100 %	65.385.885,-
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran	Kota Blitar	12 laporan	22.687.000,-	APBD	-	12 laporan	23.014.870,-
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pemadaman kebakaran	Kota Blitar	12 laporan	7.445.000,-	APBD	-	12 laporan	7.569.950,-
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Kota Blitar	12 laporan	26.246.400,-	APBD	-	12 laporan	34.801.065,-
		Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia		12 macam				12 macam	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	Kota Blitar	100 %	444.566.600,-	APBD	-	100 %	398.107.967,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusun		1 dokumen	430.616.600,-	APBD	-	1 dokumen	386.704.865,-
		Jumlah hydrant yang tersedia		4 unit				4 unit	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi		1 macam				1 macam	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	Kota Blitar	5 macam	13.950.000,-	APBD	-	5 macam	11.403.102,-
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang tersusun tepat waktu	Kota Blitar	100 %	27.960.400,-	APBD	-	100 %	101.000.000,-
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kota Blitar	100 orang	27.960.400,-	APBD	-	100 orang	101.000.000,-
JUMLAH TOTAL					17.734.352.178,-				17.273.995.064,-

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 menyesuaikan anggaran yang tersedia.

2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2022;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 ;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.
- d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2022 ini, dapat dilakukan upaya

kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, Juli 2021

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar



MUH. HADI MASKUN, SE

Pembina Tingkat I

NIP 19640617199003101

